

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Wan Dinda Nuraini B*, Ratna Dewi¹; Asri Diana²

¹Mahasiswa Universitas Al Washliyah Darussalam, Banda Aceh

^{2,3}Dosen Universitas Al Washliyah Darussalam, Banda Aceh

Email: *wandindab@gmail.com;

ARTICLE HISTORY

Received : 21 Mei 2025

Revised : 25 Mei 2025

Accepted : 26 Mei 2025

Published : 06 Juni 2025

¹²³Author Affiliation, City, Country

*Author Correspondent:

wandindab@gmail.com

Doi: -

ABSTRACT: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Tengah, wilayah yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini mencakup pihak BPBD, PUPR, Reje Kampung, dan masyarakat terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir di Kabupaten Aceh Tengah disebabkan oleh faktor alam seperti curah hujan tinggi dan kondisi geografis yang bergunung, serta faktor manusia berupa alih fungsi lahan dan illegal logging. Pemerintah daerah melalui BPBD telah melaksanakan tiga tahapan utama penanggulangan bencana, yaitu: (1) pra-bencana melalui sosialisasi mitigasi, pelatihan kesiapsiagaan, pembangunan jalur evakuasi, dan pemanfaatan dana desa; (2) tanggap darurat dengan pendirian posko evakuasi, koordinasi lintas sektor, serta distribusi bantuan secara cepat dan tepat; dan (3) pasca-bencana yang mencakup rehabilitasi infrastruktur dan pendataan kerusakan untuk penyusunan rencana pemulihan. Kendala utama yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, dan koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun upaya penanggulangan banjir telah dilakukan secara sistematis oleh Pemerintah Daerah, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan regulasi, edukasi publik, serta peningkatan kapasitas lembaga terkait.

KEYWORDS: Pemerintah Daerah, Banjir, Mitigasi, BPBD, Aceh Tengah

ABSTRACT

This study aims to analyse the role of the local government in flood disaster management in Aceh Tengah Regency, an area prone to hydrometeorological disasters such as flash floods. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants in this study include the Regional Disaster Management Agency (BPBD), the Public Works and Housing Agency (PUPR), village heads, and affected communities. The results of the study indicate that floods in Aceh Tengah Regency are caused by natural factors such as high rainfall and mountainous geographical conditions, as well as human factors such as land use change and illegal logging. The local government, through

the BPBD, has implemented three main stages of disaster management: (1) pre-disaster through mitigation awareness campaigns, preparedness training, the construction of evacuation routes, and the utilisation of village funds; (2) emergency response through the establishment of evacuation posts, cross-sector coordination, and the rapid and accurate distribution of aid; and (3) post-disaster, which includes infrastructure rehabilitation and damage assessment for the preparation of recovery plans. The main obstacles faced include budget constraints, low public awareness, and inter-agency coordination. This study concludes that although flood mitigation efforts have been carried out systematically by the local government, their effectiveness still needs to be improved through strengthened regulations, public education, and enhanced capacity of relevant institutions.

Keywords: Local Government, Flood, Mitigation, BPBD, Central Aceh

Publishers: Pengelola Jurnal
Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh,
Banda Aceh, Indonesia

Licensed: This work is licensed under
A Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Pendahuluan

Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Luapan air yang melebihi muka air normal dan menggenangi dasar sungai sehingga menyebabkan banjir di daerah yang lebih rendah. Definisi banjir adalah keadaan dimana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan Banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadang kala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut dengan banjir bandang.

Penyebab banjir antara lain mencakup curah hujan yang tinggi, limpasan air ke permukaan yang meluap melebihi kapasitas pengaliran sistem aliran sungai. Banjir juga disebabkan rendahnya intitusi tanah sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir terkadang datang secara tiba-tiba, karena kejadian banjir dapat terjadi karena banjir kiriman, banjir lokal maupun banjir pasang. Hal ini menyulitkan masyarakat dalam mengantisipasi resiko yang ditimbulkan oleh bencana banjir. Salah satu kejadian bencana banjir yang sering terjadi diakibatkan karena erosi dan tumpukan sampah.

Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang berada di kawasan dataran tinggi Gayo, memiliki ketinggian 200-2600 m di atas permukaan laut dengan luas wilayah sebesar 4.454,50 km². Kabupaten Aceh Tengah memiliki 14 Kecamatan yang terdiri dari 295 Kampung,

sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan kampung. Kabupaten Aceh Tengah ini memiliki potensi bagian Hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, dan angin kencang). Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2021 merilis informasi bahwa pada bulan November tahun 2021 telah terjadi banjir di Kabupaten Aceh Tengah. Banjir tersebut disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi sehingga debit air sungai di wilayah tersebut meluap. Banjir tersebut melanda dua Kecamatan yaitu Pegasing dan Linge. Dampak dari banjir tersebut adalah 7 unit rumah rusak, 57 hektar sawah terendam, 8 titik tanah longsor yang menutup jalan penghubung antara Kecamatan Pegasing dan Linge.

Kejadian lainnya yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah adalah banjir bandang yang terjadi di kampung Paya Tumpi Baru Kecamatan Kebayakan pada bulan Mei 2020 disebabkan oleh curah hujan yang tinggi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tengah membuat perbukitan yang berada di atas kampung tersebut jebol dan mengalirkan material berupa batu, lumpur dan kayu. Dampak dari bencana ini adalah rusaknya belasan rumah dan 3 unit kendaraan roda empat rusak berat, disamping itu juga menyebabkan rusaknya puluhan hektar kebun masyarakat.

Banjir bandang juga terjadi pada tahun 2023 di Kecamatan Jagong Jeget bencana ini juga disebabkan oleh Intensitas hujan yang tinggi. Akibat dari bencana ini adalah lumpuhnya transportasi antar kampung di Kecamatan Jagong Jeget, bencana tersebut juga

menyebabkan 5 jembatan rusak berat, 3 unit penampungan air bersih dan instalasi jaringan air bersih rusak berat, serta lahan pertanian dan persawahan milik masyarakat rusak.

Kondisi yang demikian menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang pelayanan masyarakat untuk mengetahui serta berupaya mengantisipasi gejala bencana dan bukan hanya bergerak setelah kejadian. Menurut undang-undang No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa penyelenggara penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Berdasarkan nilai kerugian frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan. Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang tinggi. Di samping faktor manusia berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat dan membuat penumpukan sampah yang mengakibatkan penyumbatan penyaluran air yang mengakibatkan banjir. Penggundulan hutan di daerah tangkap air hujan juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena pasokan air masuk ke dalam sistem aliran menjadi tinggi. Melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam. Hal ini menyebabkan terjadinya sedimentasi sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Selain itu kurangnya daerah resapan juga merupakan kontribusi terhadap meningkatnya debit banjir.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati nomor 100 tahun 2020 mengenai Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tertera pada Bab IV Pasal 5 menyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mempunyai tugas Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Penanggulangan Bencana daerah yang menjadi kewenangandaerah dan tugas pembantu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang kemudian di lanjutkan dengan Pasal 6 menyatakan bahwa Untuk melaksanakan tugas yang di maksud pada pasal 5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi (Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 100 Tahun 2020 Bab IV Pasal 5-6 Tentang Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020, n.d.):

1. Perumusan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkordinasian pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan meyeluruh.
3. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis bidang Penanggulangan bencana daerah.
4. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana daerah.
5. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana daerah.
6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan daerah bidang penanggulangan bencana daerah.
7. Melakukan pembinaan terhadap UPTD.
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Pelaporan.

BNPB sebagai badan tersendiri yang memiliki fungsi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait massalah massalah bencana alam dan menetapkan standarisasi dan kebutuhan tentang penyelenggaraan bencana. Namun yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah tidak seperti itu. Oleh karena itu, Penelitian ini penting untuk dikaji dan diteliti oleh penulis untuk membuat tulisan dalam bentuk Skripsi berjudul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tengah"

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Pada prinsipnya penelitian sangat tergantung pada penggunaan metode yang tepat agar peneliti dapat menemukan dan mendapatkan data yang akurat dan valid dari objek penelitian tersebut, dengan adanya data yang diperoleh dapat membantu peneliti dalam menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pristiwa, aktifitas sosial, sikap kepercayaan,

persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul. Penelitian kualitatif memiliki tiga komponen utama. Ada data yang datang dari berbagai wawancara dan observasi merupakan sumber-sumber yang paling umum digunakan.

Penelitian kualitatif terdiri atas prosedur-prosedur analisis atau interpretasi yang berbeda yang digunakan untuk sampai pada temuan atau teori. Prosedur-prosedur itu termasuk teknik-teknik untuk konseptualisasi data. Laporan tertulis dan verbal. Hal ini bisa ditunjukkan dalam jurnal-jurnal atau konferensi ilmiah serta mengambil bentuk-bentuk yang beragam bergantung pada audiensi dan aspek temuan teori yang ditunjukkan. Misalnya, seseorang bisa memaparkan peninjauan luas (*overview*) seluruh temuan atau diskusi mendalam tentang satu bagian dari kajian.

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang melibatkan langsung peneliti ke dalam subjek yang akan diteliti. Dengan ini maka peneliti akan lebih mengetahui secara jelas bagaimana subjek penelitian dalam kehidupannya sehari-hari. Pada intinya metode penelitian kualitatif adalah menggambarkan secara jelas apa yang peneliti temukan di lapangan. Banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi dan itu semua akan menambah kekayaan dan kedalaman dari hasil penelitian. Menurut J.R. Raco bahwa dalam penelitian setiap informasi yang didapatkan bisa saja mengubah arah penelitian, ini terjadi bahwa ada praduga dan asumsi peneliti tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh partisipan.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti ialah Kabupaten Aceh Tengah, Peneliti memilih daerah tersebut dikarenakan daerah tersebut pernah mengalami bencana banjir bandang dimana dikelilingi oleh pegunungan yang memiliki banyak sungai-sungai kecil oleh karena itu kondisi daerah tersebut rentan mengalami banjir dan perlu perhatian dari pemerintah.

Teknik Pengambilan Sampel

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengambilan sampel di antara lain:

1. Cluster Sampling (Pengambilan Sampel Kelompok)

Peneliti menggunakan teknik cluster sampling dengan memilih beberapa kelompok wilayah yang terdampak banjir untuk mewakili populasi yang lebih besar. Cluster sampling membantu Peneliti secara efisien mengumpulkan data dari beberapa wilayah yang berbeda, memungkinkan Peneliti untuk memahami sejauh mana dampak banjir di berbagai cluster wilayah.

2. Sampel Wilayah Terdampak Banjir

a. Survei lapangan

Metode ini melibatkan pengumpulan data langsung di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara dengan penduduk setempat

b. Studi kasus

Metode ini melibatkan analisis mendalam terhadap satu atau beberapa kasus banjir di wilayah tertentu untuk memahami penyebab, dampak, dan respon Masyarakat terhadap bencana tersebut.

3. Sampel Masyarakat Terdampak Banjir

Peneliti yang terdampak banjir di wilayah yang kami seleksi sebagai sampel. Hasil survei ini memberikan wawasan tentang persepsi, kebutuhan, dan kesiapan masyarakat terhadap bencana banjir. Responden dalam sampel masyarakat terdiri dari berbagai kelompok usia, latar belakang sosial, dan tingkat pendidikan, sehingga kami dapat memahami beragam perspektif dalam upaya penanggulangan banjir.

Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau entitas yang menyediakan informasi yang digunakan dalam penelitian atau analisis. Ini bisa berupa survei, data sekunder, sumber digital, dan wawancara. Memilih sumber data yang tepat penting karena dapat mempengaruhi kualitas dan validitas penelitian. Adapun sumber data yang dipilih oleh peneliti adalah:

1. Pak Reje (Keuchik)

Peneliti akan mencari informasi kepada Reje kampung yang terdampak banjir di kecamatan Paya Tumpi Kabupaten Aceh Tengah untuk mengetahui proses distribusi bantuan langsung ke masyarakat yang terkena dampak banjir dan hambatan yang

- dihadapi dalam distribusi bantuan ini.
2. Masyarakat
Peneliti akan mencari informasi kepada Masyarakat untuk yang terdampak banjir untuk mengetahui dampak apa saja yang di derita warga saat terjadinya bencana banjir dan seberpengaruh apa dengan ekonomi mereka.
 3. Sumber digital
Peneliti akan mencari informasi digital dampak apa saja yang disebabkan oleh bencana banjir tersebut dan Upaya apa saja yang dilakukan guna penanganannya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, karena observasi tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada awal penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan permassalahan yang diteliti untuk dijadikan pedoman, petunjuk dan arah dalam melakukan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permassalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan). Adapun Narasumber dalam penelitian adalah pak reje Paya Tumpi, dan masyarakat Payatumpi Kecamatan Kebayakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan dan setelah selesai di lapangan. "Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan langsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan dan setelah selesai di lapangan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses tertentu dalam penyusunan data yang dilakukan dengan cara yang tersistem yang diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumentasi, wawancara, catatan lapangan yang dilakukan dengan cara mengkategorikan dan mengorganisasikan data tersebut. Kemudian data tersebut dijabarkan menjadi unit-unit tertentu setelah melalui tahap sintesa data dan penyusunan dilakukan sehingga membentuk pola tertentu untuk dilakukan pemilihan terhadap data yang dianggap penting supaya dapat dilakukan penarikan kesimpulan dari data-data tersebut. Data yang ingin di reduksi dalam penelitian ini merupakan permassalahan penyaluran dana bantuan korban banjir pada Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah.

2. Penyajian Data

Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada massa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya.

3. Verifikasi Data/Kesimpulan

Kesimpulan merupakan "sebuah inti dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan atas uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh penulis berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif". Kesimpulan yang dibuat harus

relavan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian serta temuan penelitian yang sudah ditafsirkan dan dibahas dalam pembahasan sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

A. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tengah

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada azas atau prinsip-prinsip antara lain:

1. Kemanusiaan
2. Keadilan kesamaan kedudukan dalam hukum dan kepastian hukum
3. Kebersamaan
4. Kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, penanggulangan bencana juga harus didasarkan pada Prinsip-prinsip Praktis, (Nathanael Ricardo., n.d.)yaitu:

1. Cepat dan tepat
2. Prioritas
3. Koordinasi
4. Keterpaduan
5. Berdaya guna
6. Berhasil guna
7. Transparansi
8. Akuntabilitas
9. Kemitraan
10. Pemberdayaan
11. Non diskriminasi
12. Non proselitasi.

1.1 Pra Bencana

Pencegahan bencana adalah serangkaian langkah yang dirancang untuk mengurangi risiko bencana serta mengatasi konsekuensi yang mungkin timbul. Fokusnya adalah pada mengurangi ancaman bencana dan menangani kerentanan pihak yang mungkin terkena dampak bencana. Tujuan dari tahap pra bencana adalah meningkatkan kapasitas individu, kelompok, dan lembaga dalam menghadapi bencana. Ini melibatkan beberapa kegiatan, termasuk:

1. Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Bencana
- Meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam merespons bencana dengan

melaksanakan pelatihan dan simulasi. Ini membantu mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi situasi darurat dan meningkatkan koordinasi antarlembaga.

2. Penguatan Sistem Peringatan Dini

Membangun dan meningkatkan infrastruktur serta sistem peringatan dini untuk memberitahu masyarakat tentang ancaman bencana yang akan datang. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan pencegahan atau evakuasi tepat waktu.

3. Pengembangan Keterampilan dan Pengetahuan Teknis

Memberikan pendidikan dan pelatihan teknis yang diperlukan bagi individu, kelompok, dan lembaga untuk merespons secara efektif terhadap bencana. Ini bisa termasuk pelatihan dalam pertolongan pertama, penyelamatan, manajemen bencana, dan teknologi terkini dalam pemantauan dan mitigasi bencana.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap dan mampu merespons bencana dengan lebih efektif, mengurangi dampak negatifnya, dan memperkuat ketahanan komunitas terhadap ancaman bencana. Wawancara dengan Gusti Martosa sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tengah. Adapun hasil wawancara dari Narasumber adalah sebagai berikut:

"Untuk pencegahan banjir itu sendiri kami sudah melakukan mitigasi/sosialisasi yang memberikan pelatihan tentang kesiapan dalam menghadapi bencana, membuat pamflet/ himbauan pada daerah-daerah yang sering terjadi bencana, membuat jalur evakuasi di daerah-daerah yang rawan banjir, dan membangun shelter/posko untuk pengungsian" (wawancara pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 9.30 WIB.)

Gambar. 1
Wawancara Bersama Sekretaris BPBD

Aceh Tengah

Sumber: Dokumentasi Penelitian. 2025

1.2 Strategi Pencegahan Banjir

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu Strategia yang artinya seni umum atau dalam bahasa Indonesia adalah seni dari seorang panglima yang biasa digunakan untuk berperang. Secara umum, Pengertian Strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang mempunyai tujuan jangka panjang, yang disertai sekelompok orang dimana sekelompok orang tersebut memiliki tujuan yang sama dengan pemimpinnya.

Pencegahan banjir dalam hal ini juga membutuhkan strategi yang sesuai agar bencana banjir tidak terjadi lagi. Salah satu aspek yang berkaitan erat dengan bencana banjir adalah daerah aliran sungai dan pegunungan Adapun strategi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah di sertai dengan upaya yang diang disampaikan oleh Gusti Martosa, ST Sekretaris badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tengah.

"Strategi yang dilakukan oleh BPBD adalah mensosialisasikan Pencegahan banjir dan meminta desa agar dapat menggunakan dana desa untuk kegiatan-kegiatan yang bisa mencegah banjir seperti membersihkan saluran drainase, dan melakukan penanaman pohon yang dapat mengurangi resiko terjadinya banjir , serta melakukan pengaturan tata guna lahan yang di mana tujuannya untuk mengatur pemakaian lahan guna memperkecil resiko terjadinya banjir" (wawancara pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa strategi pencegahan bencana banjir yang di terapkan oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Salah satu pendekatan yang di tekanan adalah upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai urgensi dan langkah-langkah konkret dalam mitigasi resiko banjir di tingkat lokal. Diseminasi informasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi resiko bencana banjir. Terlebih lagi, BPBD juga menggunakan dana desa untuk megalokasikan sumber daya kegiatan yang secara substansial berkontribusi dalam upaya pencegahan banjir, seperti pemeliharaan saluran drainase dan program penanaman vegetasi. Tindakan ini mencerminkan upaya BPBD dalam menggerakkan sinergi antara sektor publik dan

masyarakat dalam konteks mitigasi resiko bencana banjir.



Tidak hanya terfokus pada aspek sosial, BPBD juga menekankan pentingnya pengaturan tata guna lahan sebagai elemen penting dalam strategi pencegahan banjir. Upaya pengaturan ini di arah pada optimalisasi penggunaan lahan yang dapat meminimalisir dampak banjir melalui pengurangan aliran permukaan air hujan yang terlalu cepat atau signifikan. Langkah ini diperlukan mengingat perubahan tata guna lahan yang tidak terencana secara cermat secara cermat dapat mengingatkan kerentanan terhadap banjir, baik dalam skala lokal maupun regional. Sebagai konsensi, BPBD menegaskan bahwa melalui pendekatan yang melibatkan pengolahan partisipatif dan regulatif dalam tata guna lahan, mereka hanya berupaya untuk merespon dampak bencana secara pasif, namun juga proaktif dalam mengidentifikasi dan mengurangi faktor-faktor pemicu resiko banjir tingkat lokal.

1.3 Penyebab Terjadinya Banjir di Paya Tumpi

Banjir terjadi Ketika curah hujan berlebihan melebihi kapasitas alami atau insfruktur perkotaan yang ada. Air hujan yang tidak terserap ke dalam tanah, atau saluran air yang tidak dapat menampungnya, menguap dan menggenangi tanah, pemukiman, dan jalan. Faktor-faktor lain seperti Pembangunan daerah aliran Sungai, pencegahan penggundulan hutan, dan perubahan iklim juga dapat membantu mengurangi resiko banjir. Banjir tidak hanya disebabkan oleh cuaca hujan yang tinggi tetapi merupakan interaksi kompleks antara cuaca, lingkungan, dan aktifitas manusia. Sebagai mana laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) telah terjadi bencana alam banjir bandang di desa paya tumpi, kecamatan kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Adapun penyebab bencana banjir bandang ini yang di

sampaikan oleh Lahat, S.H., M.A.P selaku kepala bidang pencegahan, Kesiapsiagaan dan damkar BPBD kabupaten aceh Tengah mengatakan bahwa: "Karena kabupaten aceh Tengah berada di daerah pegunungan maka terdapat kantung-kantung air pada saat curah hujan terlalu tinggi. Kantung-kantung air tersebut jebol tidak dapat lagi menampung air maka mengakibatkan banjir bandang yang terjadi secara tiba-tiba yang mengakibatkan rusaknya pemukiman warga oleh karena itu hal itu kami simpulkan karena sudah dilakukan pemantauan oleh tim kami" (wawancara pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 10.00 WIB).

Dari hasil di atas dapat di simpulkan bahwa penyebab terjadinya banjir di desa paya tumpi, kecamatan kebayakan, kabupaten aceh Tengah di samping faktor hujan yang tinggi, adalah karena pecahnya kantung- kantung air yang tidak dapat mampu menampung volume air yang berlebihan. Faktor-faktor seperti kontur lahan yang miring dan kondisi tanah yang kurang permiabel di daerah dataran tinggi dapat memperburuk situasi. Misalnya, air hujan turun secara cepat di lereng bukit atau pegunungan dapat mengalir dengan cepat ke Lembah dataran rendah, menyebabkan genangan air atau bahkan banjir. Selain itu, Pembangunan yang tidak terencana atau penebangan hutan yang berlebihan di daerah dataran tinggi dapat mempengaruhi siklus hidrologi alami, meningkatkan resiko erosi tanah dan mengubah pola aliran air.

1.4 Penyebab Terjadinya banjir di Jagong Jeget

Banjir terjadi ketika curah hujan yang sangat tinggi melebihi kapasitas alami atau infrastruktur perkotaan yang ada. Air hujan yang tidak dapat diserap ke dalam tanah atau tidak tertampung oleh saluran air menggenangi tanah, pemukiman, dan jalan. Faktor lain seperti pembangunan di daerah aliran sungai, pencegahan penggundulan hutan, dan perubahan iklim juga dapat membantu mengurangi risiko banjir. Banjir bukan hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara cuaca, lingkungan, dan aktivitas manusia. Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), bencana alam banjir bandang telah terjadi di desa Gegarang, kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Penyebab dari bencana banjir bandang ini telah dijelaskan oleh Gusti Martosa, ST Sekrestaris badan penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tengah menatakan bahwa: "*Banjir yang membawa material pasir dan batu ke wilayah tersebut disebabkan oleh perubahan fungsi hutan yang disebabkan oleh tindakan manusia, seperti praktik illegal logging (pembalakan liar) dan pembukaan lahan perkebunan yang tak terkendali*". (wawancara pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 9.34 WIB.)

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa banjir yang terjadi di desa Gegarang, kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, dan yang membawa material pasir serta batu ke wilayah tersebut disebabkan oleh perubahan fungsi hutan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Perubahan fungsi hutan ini terutama disebabkan oleh praktik illegal logging (Penebangan liar) dan pembukaan lahan perkebunan secara sembarangan. Pembalakan liar menghilangkan vegetasi yang seharusnya menyerap air hujan dan memperkuat tanah, sementara pembukaan lahan yang tidak terencana menyebabkan hilangnya penahan erosi dan meningkatkan risiko material longsor terbawa oleh aliran air. Kedua aktivitas ini mengurangi kemampuan tanah untuk menampung air hujan, sehingga air mengalir dengan cepat ke area yang lebih rendah, membawa serta material seperti pasir dan batu, dan akhirnya menyebabkan banjir yang merusak.

1.5 Penyebab Terjadinya Banjir Di Kecamatan Pegasing

Banjir adalah fenomena alam yang terjadi ketika curah hujan yang sangat tinggi melebihi kapasitas alami atau infrastruktur perkotaan yang ada. Dalam kondisi ini, air hujan tidak dapat diserap ke dalam tanah atau tidak tertampung oleh saluran air yang tersedia, sehingga menyebabkan genangan di berbagai area. Menurut Laporan yang di sampaikan oleh Staf Pusdatin Badan Penanggulanga bencana Aceh (BPBA), Haslibda Juwita dalam Keterangan Persnya, Rabu 21 Februari 2024, ada tiga desa yang terendam Banjir, Yaitu Wih Lah, Pedekok, dan Erlop. Adapun Penyebab Tejadinya banjir dikarenakan Hujan Deras yang mengguyur Kecamatan Pegasing Sejak Selasa sore , 20 Februari 2024

1.6 Tanggap Darurat

Tanggap darurat saat terjadi bencana melibatkan kerja sama dan koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Kesiapan, respon cepat, dan upaya bersama untuk mengurangi resiko dan melindungi masyarakat

menjadi kunci dalam menghadapi situasi darurat yang ditimbulkan oleh bencana. Tujuan tahap tanggap darurat adalah menyalurkan bantuan darurat kepada korban bencana. Selain itu, upaya dilakukan untuk mengendalikan situasi darurat, mengurangi dampak bencana, dan memulihkan keamanan dan ketertiban.

Wawancara dengan Ir. Andalika, ST Selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Tengah Mengatakan bahwa: *"Penanganan sementara bila terjadi bencana banjir itu, kita dilokasi melihat kondisinya seperti apa, sehingga kita dapat menghubungi instansi/dinas yang terkait untuk ikut berpartisipasi karena kita itu sebagai titik koordinasi dalam penanggulangan bencana. Dilokasi kalau sifatnya itu rehabilitasi maka kita langsung ke lapangan dan mengevakuasi korban ketempat yang lebih aman dengan terlebih dahulu mendirikan tenda gawat darurat atau menyediakan tempat pengungsian sementara. Sebagai Kepala Pelaksana, saya harus memahami prinsip organisasi yang saya pimpin, serta bagaimana pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan dan mengetahui kebutuhan mereka, kemudian BPBD juga ikut melaporkan kepada Gubernur, dan juga dinas PU Untuk membantu dalam hal penanganan pembangunan dan juga bantuan untuk Masyarakat terkait kerusakan yang dialami"* (wawancara pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 10.40 WIB).

Selanjutnya Wawancara dengan masyarakat yaitu Khairul yang terdampak banjir, mengatakan bahwa:

"Untuk tempat pengungsian kami sudah di sediakan tenda darurat oleh BPBD yang berada di tempat yang aman, tempat pengungsian yang di sediakan sudah termasuk layak dalam keadaan darurat" (wawancara pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 10.40 WIB).

Pernyataan informan diatas menjelaskan langkah bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ketika terjadi resiko bencana yaitu langkah pertamanya adalah terjun langsung ke lokasi yang terkena dampak bencana dengan mengamankan korban ke tempat yang telah didirikan tenda atau menyediakan tempat pengungsian sementara.

Penuturan Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten aceh tengah bahwa ketika terjun di lokasi, penanganan bencana sementara perlu dilakukan sehingga anggota bisa mendata dan mengevaluasi kebutuhan yang diperlukan setelah diketahui maka selanjutnya adalah

menghubungi instansi/dinas terkait untuk membantu dalam penanganan korban, karena untuk massalah besar seperti banjir tentu tidak bisa dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sendiri sehingga dibutuhkan instansi/dinas yang lain untuk terlibat dan membantu menangani bencana yang ada.

Hasil wawancara di atas juga tentunya memberikan pertanyaan sejauh mana peran pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tengah yaitu dengan membentuk sebuah Perda yang secara spesifik membahas tentang tata kinerja organisasi di bidang khusus penanggulangan bencana seperti BPBD itu sendiri.

Selanjutnya wawancara dengan Gusti Martosa, ST adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tengah Menyatakan bahwa:

"Koordinasi antar pemangku kepentingan telah terjalin dengan baik, antara lain Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PK, TNI/Polri, Lembaga Kemahasiswaan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Keseluruhan kerjasama ini diorganisasikan dalam sebuah posko bernama Posko yang dipimpin langsung oleh Kepala BPBD. Seluruh data, informasi dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana disalurkan melalui Posko ini, sehingga menyediakan saluran komunikasi yang ringkas dan efisien" (wawancara pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 10.10 WIB).

Hasil wawancara dapat di simpulkan bahwasanya dengan adanya Pos Komando yang berfungsi sebagai pusat komunikasi dan koordinasi untuk Mengumpulkan, dan menyebarkan informasi tentang bencana serta mengarahkan kegiatan penanggulangan. Adapun dengan adanya Kerjasama antar lintas sektor ini dapat mengatasi kekurangan dalam sumber daya manusia saat proses penyelamatan para pengungsi.

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 100 tahun 2020 tentang Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tertera pada bab IV Pasal 5 Yang berbunyi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Penanggulangan Bencana daerah yang menjadi kewenangandaerah dan tugas pembantu sesuai

dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang kemudian di lanjutkan pada Pasal 6 yang berbunyi Untuk melaksanakan tugas.

Wawancara dengan Lahat, S.H, M.A.P Selaku kepala bidang pencegahan, Kesiapsiagaan , dan damkar BPBD Kabupaten Aceh Tengah mengatakan bahwa:

"BPBD Aceh tengah dalam menjalankan fungsi tata kerjanya sudah efektif. Ini tentunya menunjukan pemerintah kabupaten Aceh Tengah serius dalam mempersiapkan diri dalam hal menangani resiko bencana dengan membuat aturan main yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri dan tentunya meningkatkan antisipasi bagi pemerintah daerah. kerja organisasi" (wawancara dengan ivan ibrahim pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 11.10 WIB).

Dari wawancara dengan salah satu anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diatas memberikan penjelasan bahwa Pemerintah kabupaten Aceh Tengah telah membuat Perda tentang bagaimana hak, kewenangan dan fungsi tata kerja organisasi tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan Tina selaku Masyarakat yang terdampak banjir, mengatakan bahwa:

"Dengan adanya Perda kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan bencana menjadi terarah, karena kita mengingat setiap daerah yang ada di Indonesia berbeda-beda sehingga segala bentuk bencana alam yang terjadi juga dapat berpariatif, ini tentunya membutuhkan penanganan yang khusus seperti di kabupaten aceh tengah sendiri dan pelatihan terkait penanganan banjir agar kami dapat lebih mandiri dalam menghadapi situasi darurat" (wawancara pada tanggal 3 Maret 2024 pukul 10.00 WIB).

Tanggapan di atas dapat kita ketahui bahwa masyarakat sangat antusias dalam penanggulangan bencana dan juga ingin di berikan lebih banyak sosialisasi agar Masyarakat dapat lebih mandiri dan tanggap pada saat menghadapi bencana banjir.

1.7 Pasca Bencana

Setelah terjadi bencana, tahap pasca bencana mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan daerah yang terdampak dan membantu masyarakat dalam membangun kembali kehidupan mereka. Rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki semua aspek pelayanan publik atau masyarakat

hingga mencapai tingkat yang memadai di wilayah pasca-bencana, dengan fokus utama pada normalisasi atau kembali berjalannya semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Sementara itu, rekonstruksi merupakan proses pembangunan kembali infrastruktur, sarana, dan infrastruktur di wilayah pasca-bencana, baik dalam hal pemerintahan maupun masyarakat. Tujuan utamanya adalah memulihkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperkuat hukum, perdamaian, serta peran masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial di wilayah pasca-bencana.

Peraturan yang menjadi pedoman peneliti yaitu Peraturan Bupati Aceh Tengah Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 100 tahun 2020 pasal 8 dan 9 tentang pengelolaan data dan pengawasan, Kerjasama teknis.

Wawancara dengan Lahat, S.H., M.A.P selaku kepala bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Damkar BPBD Kabupaten Aceh Tengah mengatakan bahwa:

"Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah pasca bencana pertama kita melakukan pendataan kerusakan dan menghitung kerugian kita juga melihat apa saja yang dibutuhkan seperti perbaikan bada jalan, rumah, dan fasilitas lainnya yang rusak akibat terkena banjir. Untuk anggaran kita bekerja sama dengan PUPR, Pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat" (wawancara pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 11.00 WIB).

Wawancara di atas dan bukti pengamatan di lapangan dapat di simpulkan bahwasanya tugas pokok dan fungsi BPBD umumnya yaitu Melaksanakan upaya penanggulangan bencana, termasuk pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait.

Sesuai dengan teori peran yang dikemukakan Tjandra, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan arahan dan kewenangan terhadap kegiatan masyarakat di suatu wilayah seperti negara atau kota. Misalnya, dengan membangun bendungan di daerah rawan banjir, pemerintah daerah menunjukkan peran aktif dalam penanganan banjir pada tahap pascabencana.

Selanjutnya Wawancara dengan masyarakat Raihan yang terdampak banjir mengatakan bahwa:

"Sebagai anggota masyarakat, saya sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan badan penanggulangan bencana daerah. Kami berharap mereka tetap tanggap dalam membangun fasilitas pencegahan banjir dan memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir"(wawancara pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 14.00 WIB)

Hasil wawancara di atas serta bukti di lapangan sudah adanya pemulihan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dalam teori peran pemerintah daerah yang dikemukakan oleh Tjandra, pemerintah diharapkan memberikan arahan dan administrasi yang tepat terhadap aktivitas masyarakat dalam suatu wilayah seperti negara atau kota. Meskipun proses pemulihan infrastruktur yang rusak akibat banjir masih belum merata, namun tindakan ini mencerminkan keterlibatan pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir pada tahap pascabencana.

Selanjutnya wawancara dengan Wahyuna, ST Kepala bidang Tata RuangDinas PUPR kabupaten Aceh Tengah Mengatakan bahwa:

"Pada saat Setelah terjadinya banjir Kami melakukan evaluasi terhadap infrastruktur yang terkena dampak dan segera menyiapkan rencana pemulihan. Kemudian di lanjutkan proses tanggap darurat untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat banjir.Kami telah melakukan survei untuk menilai kerusakan rumah akibat banjir untuk mendata daftar rumah yang membutuhkan perbaikan mendesak dan juga telah menyusun anggaran. Selain itu Kami juga mempertimbangkan beberapa opsi, termasuk pemberian bantuan Material seperti bahan bangunan dan peralatan untuk melakukan perbaikan"(wawancara pada tanggal 1 Maret 2024 pukul 10.30 WIB).

Wawancara di atas dapat di buktikan bahwa selain badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), Dinas PUPR juga terlibat dalam penanganan Prabencana banjir dimana bertugas sebagai Pelaksana rehabilitasi Keadaan sekitar yang terdampak banjir. Namun berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, pernyataan para informan menunjukkan bahwa implementasi program pada tahap pascabencana belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terbukti dari bukti observasi yang telah dilampirkan sebelumnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa program pada tahap pascabencana masih belum terlaksana sepenuhnya.

Simpulan

Penulis telah melakukan penelitian tentang "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Tengah" melalui metode Kualitatif dengan langkah-langkah yang dilakukan berupa wawancara dan observasi. Oleh karena itu penulis mengambil kesimpulan:

1. Peran Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah

Peran Pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Tengah dalam pencegahan bencana banjir sangat penting untuk mengurangi resiko dan dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang mitigasi bencana banjir, penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir serta cara-cara untuk mengurangi resiko terjadinya bencana tersebut. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam menghadapi potensi banjir yang dapat mengancam.

Selain itu, pemerintah daerah juga aktif dalam melakukan mitigasi bencana dengan memberikan penanda atau tanda pada wilayah-wilayah yang rawan terkena banjir. Tanda-tanda ini memberi peringatan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang berpotensi memicu terjadinya banjir. Langkah ini merupakan bagian dari strategi preventif yang diimplementasikan untuk mengurangi kerugian material maupun korban jiwa yang disebabkan oleh banjir di wilayah tersebut.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga berperan dalam mengkoordinasikan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan Kesiapsiagaan dan respon dalam menghadapi bencana banjir. Hal ini meliputi pembentukan tim tanggap bencana, penyediaan fasilitas evakuasi, dan peningkatan kapasitas dalam penanganan darurat. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder terkait lainnya, diharapkan mitigasi bencana banjir dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.

2. Penyebab terjadinya banjir

Penyebab terjadinya banjir di Aceh Tengah adalah curah hujan yang tinggi, topografi yang bergunung-gunung, perubahan tata guna lahan, kondisi sungai yang tidak teratur, sistem drainase yang buruk, dan perubahan iklim global. Resiko banjir di daerah tersebut meningkat karena kombinasi dari faktor-faktor ini. Akibatnya, tindakan pencegahan yang menyeluruh diperlukan untuk mengurangi resiko dan konsekuensi banjir. Tindakan ini meliputi tata lahan yang berkelanjutan, perbaikan sistem drainase, dan peningkatan kemampuan untuk menangani bencana alam.

3. Kendala yang dihadapi BPBD

Pemerintah aceh tengah menghadapi kendala dalam menangani bencana banjir. Selain perubahan iklim yang tidak terduga, kurangnya kesadaran masyarakat membuat penanggulangan banjir semakin sulit. Mengatasi banjir dengan sangat sulit karena kekurangan sumber daya terutama anggaran, peralatan, dan tenaga kerja. Dalam mengatasi kendala-kendala ini diperlukan koordinasi, pendidikan dana penyuluhan kepada masyarakat, serta membangun infrastruktur yang dapat mengurangi resiko banjir.

Ucapan Terima Kasih

Terima Kasih kami ucapkan kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada pihak pengelola jurnal policia: Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan yang telah membantu dalam penerbitan penelitian ini.

Daftar Pustaka

Brown Lauran, *An Introduction to Emergency Management*, Butterworth-Heinemann, Ofxford, 2015.

Tjandra, Kartono, Empat Bencana geologi yang paling Mematikan, UGM PRESS, Yogyakarta, 2018.

Paiman, Suskresno I.B, Teknik Mitigasi banjir dan Tanah Longsor, Tropenbos internasional indonesia programe, Bogor, 2019.

Kartono Tjandra, Empat bencana geologi paling mematikan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2017.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 tahun 2020 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Aceh Tahun 2020-2024.

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 100 tahun 2020 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Sri Heryati, "Peran Pemerintah Dalam Penanguulangan Bencana," *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, Institut Pemerintahan dalam Negeri, Jawa Barat, 2020.

Aidil, I., "Peran Pemerintah dalam penanggulangan Bencana banjir di Kecamatan Balocci Kabupaten Pungkep." *Laporan Penelitian*, Univesitas Muhamadiyah, Makasar, 2015.

Kabupaten Aceh Tengah. "Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026", Laporan Rancangan Akhir, BAPPEDA, Aceh Tengah, 2020.

[https://www.nawasis.org/portal/digilib/read/kerangka-aksi-hyogo-pengurang-an-resiko-bencana-2005-2015-membangun-ketahanan-bangsa -dan-komunikasi-terhadap-bencana/1104/](https://www.nawasis.org/portal/digilib/read/kerangka-aksi-hyogo-pengurang-an-resiko-bencana-2005-2015-membangun-ketahanan-bangsa-dan-komunikasi-terhadap-bencana/1104/), di akses pada tanggal 10 Maret 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/daftar_kecamatan_dan_gampong_di_kabupaten_Aceh_Tengah/, di akses pada tanggal 1 April 2024.

<https://transformasi.com/2021/05/28/12-prinsip-penanggulangan-bencana/>, di akses pada tanggal 4 Maret 2024.

<https://pkk.acehtengahkab.go.id/halaman/profil-kabupaten-aceh-tengah/>, di akses pada tanggal 2 April 2024.

<https://jatim.bps.go.id/subject/101/pemerintahan.html#subjekViewTab1>, di akses pada tanggal 10 Juli 2024.